



**KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DI PENGADILAN MILITER**

**TESIS**

**VERA YANTI  
1520922097**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**



**KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DI PENGADILAN MILITER**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**VERA YANTI**

**1520922097**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Vera Yanti  
NRP : 1520922077  
Tanggal : 14 Pebruari 2018

Jakarta, 14 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



Vera Yanti

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,  
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vera Yanti  
NRP : 1520922077  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN MILITER**

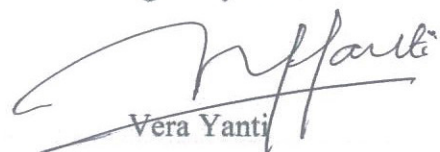
Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Pebruari 2018

Yang menyatakan

  
Vera Yanti

## PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

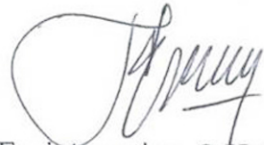
Nama : Vera Yanti

NRP : 1520922077

Program Studi : Agister Hukum

Judul Tesis : KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DI PENGADILAN MILITER


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N  
Ketua Penguji




Dr. Muhammad Sinja, S.H., M. Hum  
Penguji I/ Pembimbing



Dr. Moh. Hatta, S.H., M.Kn.  
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yuyi Tarina, S.H., M.H.  
Dekan



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N  
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 14 Pebruari 2018

**KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DI PENGADILAN MILITER**

**VERA YANTI**

**ABSTRAK**

Penyelesaian perkara pidana militer tidak dapat diliput oleh media massa dan tidak dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Tetapi berdasarkan hukumnya peradilan militer sebenarnya sama dengan peradilan umum, yakni menggunakan asas terbuka untuk umum yang dipertegas dalam Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi: “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan dinyatakan tertutup untuk umum”. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk menggambarkan pengaturan yurisdiksi peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 2. Untuk menganalisis proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan 3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Pengaturan yurisdiksi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh: 1) militer; 2) berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer; 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai militer 4) seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas; 5) sengketa Tata Usaha Militer; 6) menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana 7) sengketa kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Militer; 8) memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur. Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI sebagai berikut: a. penegakan hukum dalam organisasi TNI, b. peningkatan profesionalisme prajurit TNI c. meningkatkan kepatuhan terhadap norma Prajurit TNI d. peningkatan kinerja aparat penegak hukum TNI.

Kata Kunci :Pidana, Penyelesaian, TNI

**COMPLETION OF CRIMINAL CASES PERFORMED BY TNI  
MEMBERS BASED ON LAW NUMBER 31 YEAR 1997  
ABOUT MILITARY JUSTICE**

**VERA YANTI**

**ABSTRACT**

*The settlement of military criminal matters can not be covered by mass media and can not be witnessed by the general public. But under the law the military justice is in fact the same as the general justice, which is to use the open-ended principle of public under Article 141 paragraph (2) of Act Number 31 of 1997 which reads: "For inspection purposes, the Chief Justice opened a hearing and declared an open trial for General, except in the case of morality declared publicly ". The purpose of this study is as follows: a. To illustrate the jurisdiction of military jurisdiction as the executor of judicial power. 2. To analyze the process of criminal case settlements committed by TNI members and 3. To analyze what efforts can be taken to combat the offenses committed by TNI members. With a juridical normative research method with a case study thesis it is known that the jurisdiction setting of judicial bodies within the Military Justice environment is carried out by: 1) the military; 2) based on the law is parallel with the military; 3) a member of a class or position or body or of being ordained or regarded as a military 4) a person included in the case of connection; 5) Military Administrative dispute; 6) combine litigation claims in criminal matters 7) dispute over judicial authority within Military Courts; 8) decide on the first and final levels of disagreement between Article Substitute Officer (Papera) and Oditur. The settlement of criminal cases committed by TNI members in the military jurisdiction is the same as the criminal justice process in the scope of the general justice, which begins from the stage of investigation and investigation, prosecution stage, trial stage in the trial, and decision / execution stage. Efforts to Combat Crimes Conducted by TNI Members are as follows: a. Law enforcement in TNI organization, b. Increase of TNI soldiers' professionalism c. Increase compliance with the norms of the TNI Warrior d. Improving the performance of TNI law enforcement officers.*

**Keywords** : Criminal, Settlement, TNI

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

**“KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DI PENGADILAN MILITER “**

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

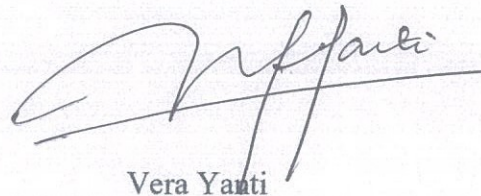
1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku Pembimbing I.
5. DR. Arrisman, SH,. MH selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – temaan di Paspampres maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.



9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 14 Pebruari 2018



Vera Yanti

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teori dan Konsep .....	8
1.5.1. Kerangka Teori .....	8
1.5.2. Kerangka Konsep .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
II.1. Hukum Pidana .....	21
II.1.1. Pengertian Hukum Pidana .....	21
II.1.2. Pengertian Tindak Pidana .....	23
II.1.3. Fungsi dan Tujuan Hukuman Pidana .....	24
II.1.4. Teori pemidanaan .....	25
II.1.5. Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana .....	26
II.2. Tindak Pidana Militer .....	29
II.2.1. Pengertian Tindak Pidana Militer .....	29
II.2.2. Sejarah Hukum Pidana Militer .....	33
II.2.3. Latar Belakang Pembentukan Peradilan Pidana Militer .....	36
II.2.4. Asas-Asas Hukum Militer .....	38
II.2.5. Hukum Disiplin Militer .....	42
II.2.6. Sistem Peradilan Pidana Militer .....	45
II.2.7. Susunan dan Kewenangan Pengadilan Militer .....	47
II.2.8. Tahapan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Militer .....	54
II.3. Tentara Nasional Indonesia .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
III.1. Tipe Penelitian .....	66
III.2. Sifat Penelitian .....	67
III.3. Sumber Data .....	67
III.4. Metode Pengumpulan Data .....	69
III.5. Metode Analisis data .....	70
<b>BAB IV PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM MILITER .....</b>	<b>71</b>
IV.1. Pengaturan Yurisdiksi Peradilan Militer .....	71
IV.2. Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI .....	78
IV.2.1. Proses penyidikan perkara pidana TNI .....	78
IV.2.2. Prosedur Beracara Di Pengadilan Militer .....	79
IV.2.3. Tahapan Pemeriksaan Dalam Persidangan .....	82
IV.2.4. Pelaksanaan Putusan .....	85
IV.3. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana di Militer .....	85
IV.4. Beberapa Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI .....	87
IV.4.1. Kasus Pidana Penganiayaan .....	87

IV.4.2. Kasus Pidana Narkotika .....	89
IV.4.3. Kasus Pidana Pemalsuan Surat.....	91
IV.4.4. Kasus Pidana Perzinaan.....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
IV.1. Simpulan.....	103
IV.2. Saran.....	104

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**